

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)** **DALAM UPAYA MELAYANI MASYARAKAT DI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi S1 untuk gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Oleh :**

**Ismi Nur Baeti**

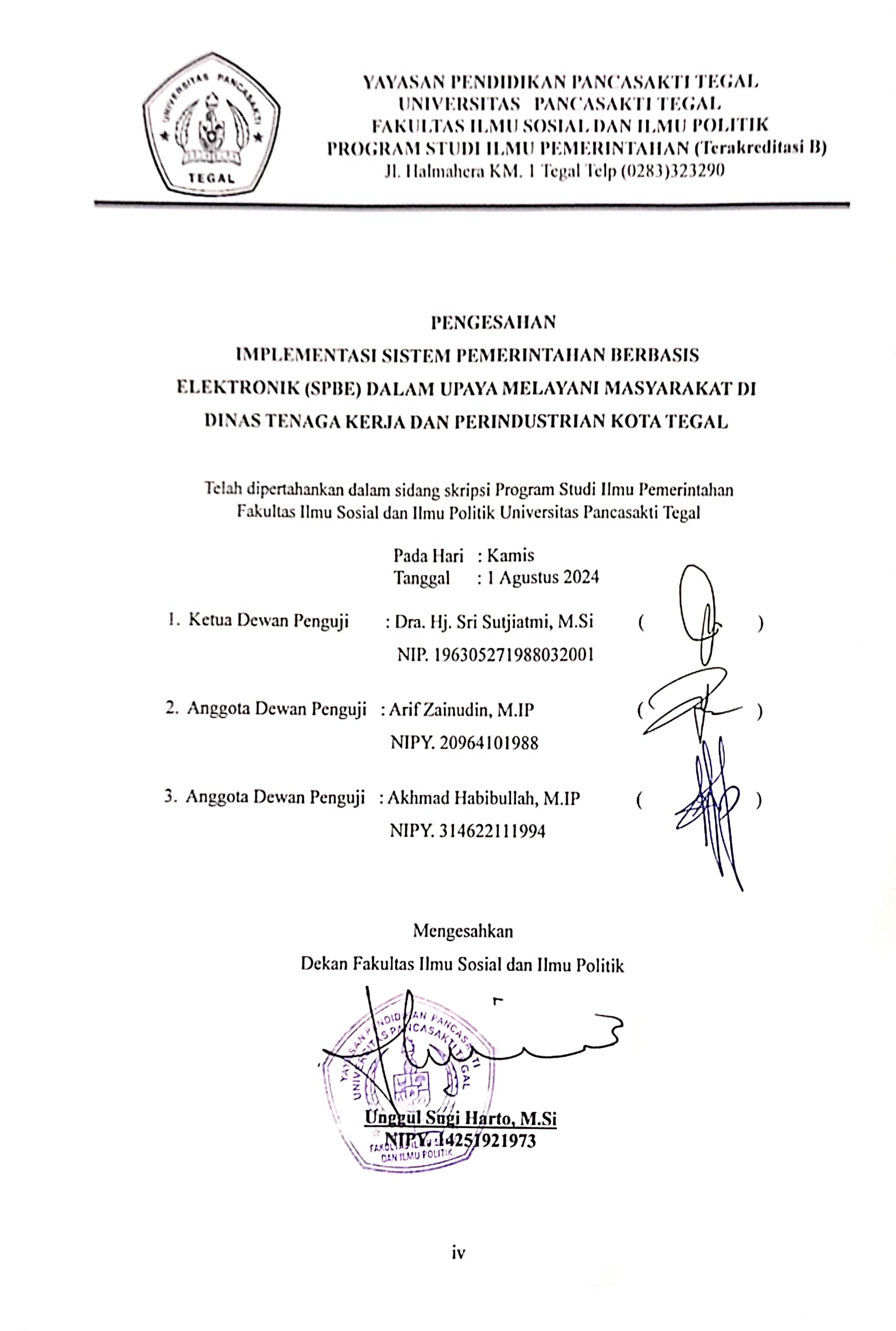
**NPM. 2120600033**

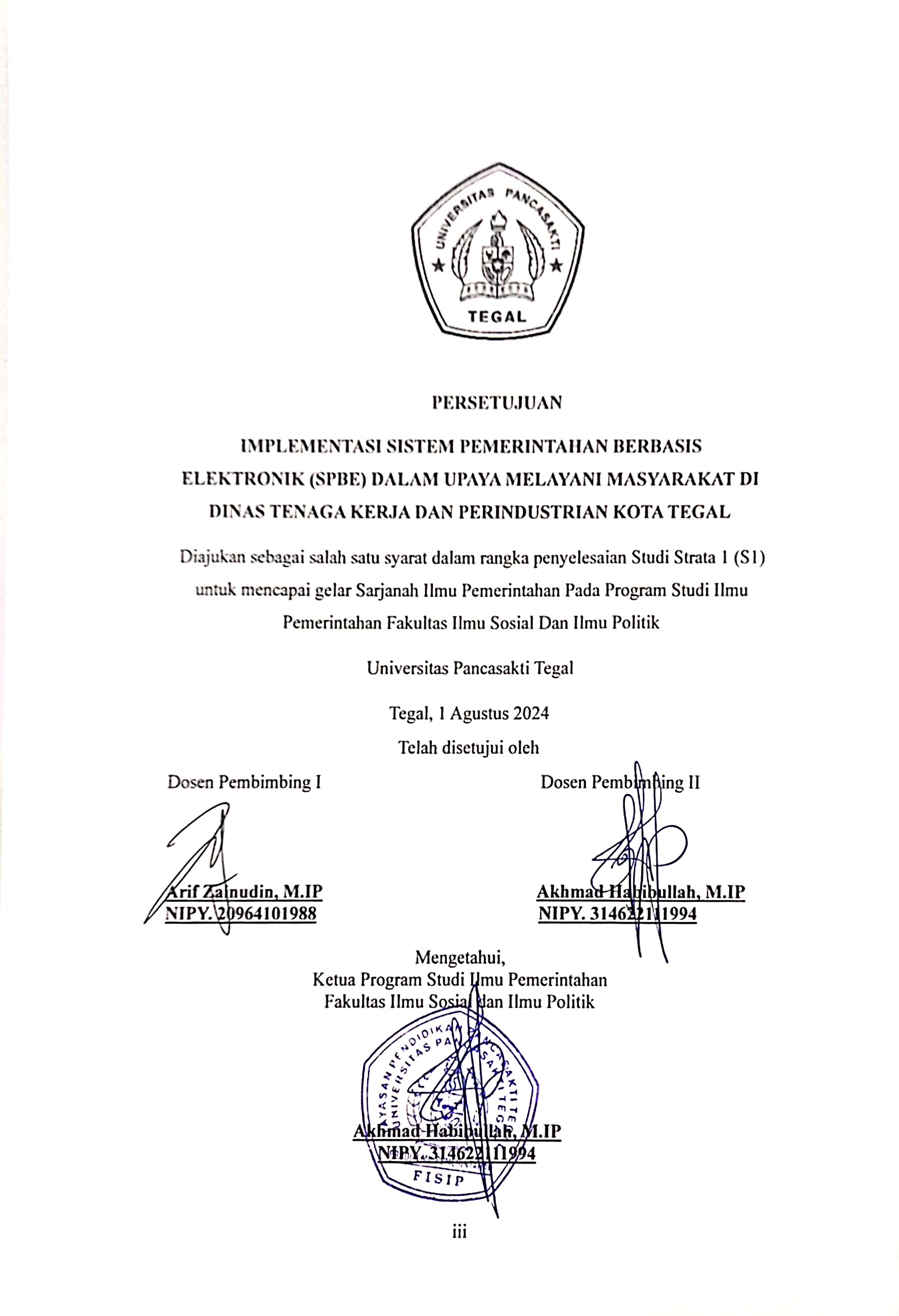
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

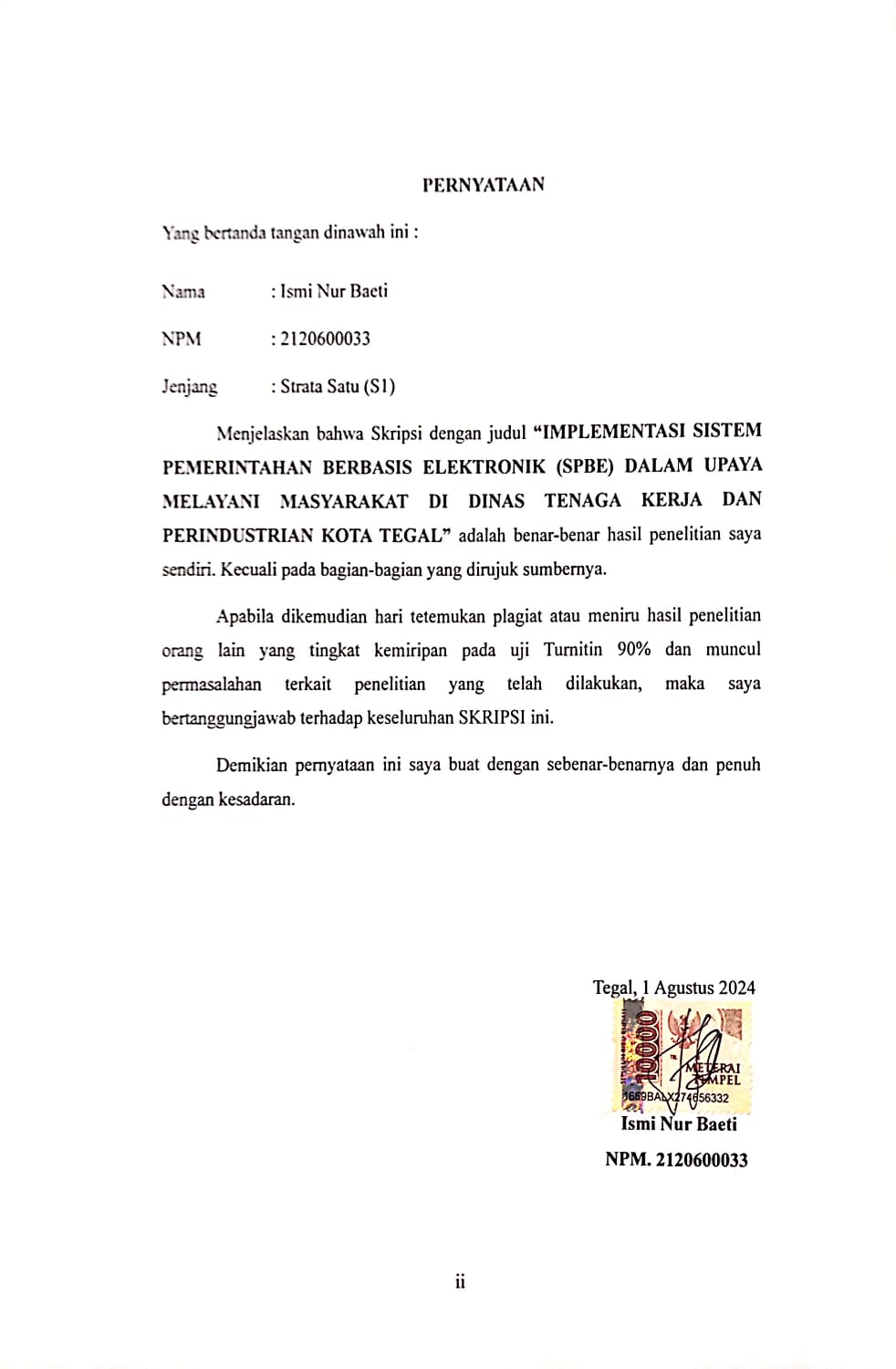
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

# MOTTO

"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan"

- Imam Syafi'i -

# PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa banggsa dan bahagia saya ucapkan rasa syukur sarta terimakasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunianya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmat, serta diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua ku tercinta Abah Jumadi dan Ibu Sugiarti, yang tiada henti mendoakan kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
3. Dosen Pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang diberikan kepada Saya selama penyusunanskripsi.
4. Teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas A angkatan 2020, Terutama Genk Kampak yaitu Nanda, Citra, Rahma, Anisa, Nailil, Helida, dan Mia. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Upaya Melayani Masyarakat”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
4. Bapak Arif Zainudin, M.IP selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas yang menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya skripsi ini.
5. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan rela meluangkan waktunya yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala hal dan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah satu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 1 Agustus 2024

Penulis

Ismi Nur Baeti

# ABSTRAK

Nama : Ismi Nur Baeti NPM : 2120600033 Judul :”Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Upaya Melayani Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal”

Pokok Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. (2) Apa saja faktor penghambat implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripsi, yang merupakan penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Upaya Melayani Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip SPBE pada Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan sudah berjalan dengan baik. Kendala dalam Implementasi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal yaitu Operator aplikasi yang bertanggung jawab atas website Disnakerin Kota Tegal belum optimal dalam menjalankan tugasnya dimana banyak informasi publik yang tidak diperbarui setiap tahun. Dan anggaran SPBE yang dialokasikan hanya untuk pengembangan aplikasi saja tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk aspek-aspek penting lainnya dalam SPBE, seperti pelatihan SDM dan pemeliharaan aplikasi.

**Kata Kunci: Implementasi, SPBE, Pelayanan Publik**

# *ABSTRACT*

*Name: Ismi Nur Baeti NPM: 2120600033 Title: "Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in an Effort to Serve the Community at the Department of Manpower and Industry of Tegal City"*

*The main problems of this research are: (1) How is SPBE implemented in an effort to serve the Tegal City Manpower and Industry Department. (2) What are the factors inhibiting the implementation of SPBE in an effort to serve the community at the Tegal City Manpower and Industry Department.*

*The type of research used is a qualitative description, which is research that can provide a factual picture regarding the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in an effort to serve the community in the Tegal City Manpower and Industry Department. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation.*

*The results of this research indicate that the implementation of SPBE at the Tegal City Department of Manpower and Industry is in accordance with the SPBE principles in Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning SPBE and it is running well. The obstacle in implementing SPBE at the Tegal City Manpower and Industry Department is that the application operator who is responsible for the Tegal City Manpower and Industry Department website is not yet running it optimally, where a lot of public information is not updated every year. And the SPBE budget allocated is only for application development, there is no budget allocated for other important aspects of SPBE, such as human resource training and application maintenance.*

***Keywords: Implementation, SPBE, Public Services***

# DAFTAR ISI

[PERNYATAAN ii](#_Toc173941194)

[PERSETUJUAN iii](#_Toc173941195)

[PENGESAHAN iv](#_Toc173941196)

[MOTTO v](#_Toc173941197)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc173941198)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc173941199)

[ABSTRAK ix](#_Toc173941200)

[ABSTRACT x](#_Toc173941201)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc173941202)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc173941203)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc173941204)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc173941205)

[I.1 Latar Belakang 1](#_Toc173941206)

[I.2 Rumusan Masalah 15](#_Toc173941207)

[I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 15](#_Toc173941208)

[I.3.1 Tujuan Penelitian 15](#_Toc173941209)

[I.3.2 Manfaat Penelitian 16](#_Toc173941210)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17](#_Toc173941211)

[II.1 Penelitian Terdahulu 17](#_Toc173941212)

[II.2 Kerangka Teori 25](#_Toc173941213)

[II.2.1 *E-Government* 25](#_Toc173941214)

[II.2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 31](#_Toc173941215)

[II.3 Definisi Konseptual 53](#_Toc173941216)

[II.4 Pokok-Pokok Penelitian 54](#_Toc173941217)

[II.5 Alur Pikir 55](#_Toc173941218)

[BAB III METODE PENELITIAN 56](#_Toc173941219)

[III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 56](#_Toc173941220)

[III.2 Lokasi Penelitian 57](#_Toc173941221)

[III.3 Jenis dan Sumber Data 57](#_Toc173941222)

[III.4 Informan Penelitian 59](#_Toc173941223)

[III.5 Teknik Pengumpulan Data 60](#_Toc173941224)

[III.6 Teknik Analisis Data 61](#_Toc173941225)

[III.7 Sistematika Penulisan 62](#_Toc173941226)

[BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 63](#_Toc173941227)

[IV.1 Gambaran Umum 63](#_Toc173941228)

[IV.1.1 Keadaan Geografis 63](#_Toc173941229)

[IV.2 Wilayah Administrasi 65](#_Toc173941230)

[IV.3 Kondisi Pemerintahan 65](#_Toc173941231)

[IV.4 Visi dan Misi Kota Tegal 66](#_Toc173941232)

[IV.5 Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 67](#_Toc173941233)

[IV.6 Kondisi Kependudukan 68](#_Toc173941234)

[IV.7 Profil Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 69](#_Toc173941235)

[IV.8 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 69](#_Toc173941236)

[IV.9 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 71](#_Toc173941237)

[IV.10 Kondisi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 72](#_Toc173941238)

[BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 76](#_Toc173941239)

[V.1 Hasil Penelitian 76](#_Toc173941240)

[V.1.1 Efektivitas 76](#_Toc173941241)

[V.1.2 Keterpaduan 84](#_Toc173941242)

[V.1.3 Kesinambungan 92](#_Toc173941243)

[V.1.4 Efisiensi 98](#_Toc173941244)

[V.1.5 Akuntabilitas 101](#_Toc173941245)

[V.1.6 Interoperabilitas 105](#_Toc173941246)

[V.1.7 Keamanan 109](#_Toc173941247)

[V.2 Pembahasan 114](#_Toc173941248)

[V.2.1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Upaya Melayani Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 116](#_Toc173941249)

[1. Efektivitas 116](#_Toc173941250)

[2. Keterpaduan 155](#_Toc173941251)

[3. Kesinambungan 159](#_Toc173941252)

[4. Efisiensi 163](#_Toc173941253)

[5. Akuntabilitas 165](#_Toc173941254)

[6. Interoperabilitas 168](#_Toc173941255)

[7. Keamanan 175](#_Toc173941256)

[BAB VI PENUTUP 179](#_Toc173941257)

[VI.1 Kesimpulan 179](#_Toc173941258)

[VI.2 Saran 180](#_Toc173941259)

[DAFTAR PUSTAKA 181](#_Toc173941260)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Jumlah Situs Web Pemerintah Pusat 4](#_Toc173932927)

[Tabel 1.2 Daftar Aplikasi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 12](#_Toc173932928)

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17](#_Toc173932934)

[Tabel 3.1 Data Set 57](#_Toc173932941)

[Tabel 3.2 Data Set 59](#_Toc173932942)

[Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan PNS di Kota Tegal 66](#_Toc173932947)

[Tabel 4.2 Jumlah Anggota DPR Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal 68](#_Toc173932948)

[Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal 69](#_Toc173932949)

[Tabel 4.4 Aplikasi SPBE di Disnakerin Kota Tegal 72](#_Toc173932950)

[Tabel 5.1 Hasil Coding Efektivitas 76](#_Toc173932953)

[Tabel 5.2 SDM SPBE di Disnakerin Kota Tegal 81](#_Toc173932954)

[Tabel 5.3 Hasil Koding Keterpaduan 84](#_Toc173932955)

[Tabel 5.4 Hasil Koding Kesinambungan 92](#_Toc173932956)

[Tabel 5.5 Hasil Koding Efisiensi 98](#_Toc173932957)

[Tabel 5.6 Hasil Koding Akuntabilitas 101](#_Toc173932958)

[Tabel 5.7 Hasil Koding Interoperabilitas 105](#_Toc173932959)

[Tabel 5.8 Hasil Koding Keamanan 109](#_Toc173932960)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1.1 Jumlah Situs Web Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota 9](#_Toc173933004)

[Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Nvivo 12 *Plus* 61](#_Toc173933010)

[Gambar 4.1 Peta Kota Tegal 63](#_Toc173933013)

[Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 71](#_Toc173933014)

[Gambar 4.3 Laman Situs Web Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 73](#_Toc173933015)

[Gambar 4.4 Laman Situs Web Lapursijaja 73](#_Toc173933016)

[Gambar 5.1 Anggaran SPBE Disnakerin Kota Tegal 81](#_Toc173933017)

[Gambar 5.2 Persyaratan dan Waktu Penyelesaian layanan Pembuatan Kartu AK1 82](#_Toc173933018)

[Gambar 5.3 Tampilan Website Disnakerin yang tidak dapat diakses 83](#_Toc173933019)

[Gambar 5.4 Laporan Kinerja Disnakerin Kota Tegal 83](#_Toc173933020)

[Gambar 5.5 Laman Situs Web Siapkerja 88](#_Toc173933021)

[Gambar 5.6 Laman Situs Web Karirhub 89](#_Toc173933022)

[Gambar 5.7 Laman Situs Web Simpegnas 90](#_Toc173933023)

[Gambar 5.8 Laman Situs Web E-Kinerja 90](#_Toc173933024)

[Gambar 5.9 Laman Situs Web LPSE 90](#_Toc173933025)

[Gambar 5.10 Laman Situs Web OSS 91](#_Toc173933026)

[Gambar 5.11 Laman Situs Web SP4N LAPOR 91](#_Toc173933027)

[Gambar 5.12 Sosialisasi Pembaruan Kebijakan SPBE 2023 96](#_Toc173933028)

[Gambar 5.13 Sosialisasi dan Workshop Manajemen Layanan SPBE 97](#_Toc173933029)

[Gambar 5.14 Fitur Silat 104](#_Toc173933030)

[Gambar 5.15 Fitur Cakar 104](#_Toc173933031)

[Gambar 5.16 Kolaborasi dengan Diskominfo Kota Tegal 107](#_Toc173933032)

[Gambar 5.17 Kartu AK1 yang disertai TTE 108](#_Toc173933033)

[Gambar 5.18 Fitur Loker (Lowongan Kerja) pada aplikasi lapursijaja 108](#_Toc173933034)

[Gambar 5.19 Pembentukan Tim Tanggap Insiden Kota Tegal 112](#_Toc173933035)

[Gambar 5.20 Word Cloud Implementasi SPBE Dalam Upaya Melayani Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 114](#_Toc173933036)

[Gambar 5.21 Cluster Analysis Implementasi SPBE Dalam Upaya Melayani Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal 115](#_Toc173933037)

[Gambar 5.22 Project Map Aspek Efektivitas 116](#_Toc173933038)

[Gambar 5.23 Jumlah Masyarakat Penggunna Aplikasi SPBE 119](#_Toc173933039)

[Gambar 5.24 Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik melalui website 120](#_Toc173933040)

[Gambar 5.25 Jumlah masyarakat yang merasakan kemudahan akses pada Website Disnakerin Kota Tegal 121](#_Toc173933041)

[Gambar 5.26 Word Cloud Kemudahan Akses pada Website Disnakerin 122](#_Toc173933042)

[Gambar 5.27 Berita pada Website Disnakerin Kota Tegal 123](#_Toc173933043)

[Gambar 5.28 Pengumuman pada website Disnakerin Kota Tegal 124](#_Toc173933044)

[Gambar 5.29 Profil Dinas pada website Disnakerin Kota Tegal 125](#_Toc173933045)

[Gambar 5.30 Laporan Kinerja Disnakerin Kota Tegal 126](#_Toc173933046)

[Gambar 5.31 Laporan Keuangan 127](#_Toc173933047)

[Gambar 5.32 Kontak Dinas 128](#_Toc173933048)

[Gambar 5.33 Peraturan perundang-undangan Disnakerin Kota Tegal 129](#_Toc173933049)

[Gambar 5.34 SOP Disnakerin Kota Tegal 130](#_Toc173933050)

[Gambar 5.35 Tampilan Website yang tidak dapat diakses 131](#_Toc173933051)

[Gambar 5.36 Jumlah Masyarakat yang mengakses Fitur Aplikasi Lapursijaja 134](#_Toc173933052)

[Gambar 5.37 Jumlah Masyarakat yang merasakan kemudahan akses pada Aplikasi Lapursijaja 135](#_Toc173933053)

[Gambar 5.38 Word cloud Kemudahan akses aplikasi lapursijaja 136](#_Toc173933054)

[Gambar 5.39 SOP Pembuatan Kartu AK1 137](#_Toc173933055)

[Gambar 5.40 Panduan penggunaan fitur pada aplikasi lapursijaja 139](#_Toc173933056)

[Gambar 5.41 Panduan Fitur Cakar 140](#_Toc173933057)

[Gambar 5.42 Panduan Fitur Caker 140](#_Toc173933058)

[Gambar 5.43 Panduan Fitur Loker 141](#_Toc173933059)

[Gambar 5.44 Panduan fitur Silat 141](#_Toc173933060)

[Gambar 5.45 Panduan Fitur Dumas 142](#_Toc173933061)

[Gambar 5.46 Data diri pencari kerja pada fitur cakar 143](#_Toc173933062)

[Gambar 5. 47 Notifikasi untuk membagikan data diri pada fitur caker 144](#_Toc173933063)

[Gambar 5.48 Laman deskripsi diri pada fitur caker 144](#_Toc173933064)

[Gambar 5. 49 Contoh Deskripsi diri pada fitur caker 145](#_Toc173933065)

[Gambar 5.50 SOP Job Cafe 146](#_Toc173933066)

[Gambar 5.51 Informasi Lowongan Kerja pada instagram job cafe 148](#_Toc173933067)

[Gambar 5.52 Layanan Strategi Mengerjakan Psikotes 149](#_Toc173933068)

[Gambar 5.53 Layanan Cara Membuat Lamaran Kerja 150](#_Toc173933069)

[Gambar 5.54 Layanan Membuat CV 151](#_Toc173933070)

[Gambar 5.55 Layanan Kesiapan Menghadapi Interview 152](#_Toc173933071)

[Gambar 5.56 Layanan Business Plan 153](#_Toc173933072)

[Gambar 5.57 *Layanan Walk In Interview* 154](#_Toc173933073)

[Gambar 5.58 Project Map Aspek Keterpaduan 155](#_Toc173933074)

[Gambar 5.59 Project Map Aspek Kesinambungan 159](#_Toc173933075)

[Gambar 5.60 Project Map Aspek Efisiensi 163](#_Toc173933076)

[Gambar 5.61 Project Map Aspek Akuntabilitas 165](#_Toc173933077)

[Gambar 5.62 Project Map Aspek Interoperabilitas 168](#_Toc173933078)

[Gambar 5.63 Project Map Aspek Keamanan 175](#_Toc173933079)

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Birokrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi menjadi bagian yang berada pada posisi terdepan dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak heran jika masyarakat selalu memberikan cara pandang tersendiri terhadap keberadaan birokrasi. Di Indonesia, masyarakat memandang birokrasi secara dikotomis. Masyarakat cenderung menilai birokrasi sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang keberadaannya dibutuhkan, namun disisi lain keberadaannya justru dianggap menjadi salah satu penyebab proses pelayanan publik tersendat dan bermasalah. (Sartika, 2013)

Banyaknya patologi birokrasi dalam pelayanan publik seperti pelayanan dengan prosedur yang rumit dan lambat, mahal, ketidaktransparan, diskriminasi, ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas, dan masih maraknya penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi yang dilakukan oleh sebagian oknum penyelenggara negara dalam bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Semua masalah ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Hal ini membuat masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. (Hasim, 2023)

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik adalah Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan *good governance* serta menjalankan perubahan dan pembaharuan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan baik dari aspek ketatalaksanaan, kelembagaan, serta sumber daya manusia aparatur. Pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. (Daraba, 2019)

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam visi reformasi birokrasi adalah modernitas. Birokrasi pemerintah di masa depan harus mampu bertransformasi dengan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses kerja birokrasi. TIK sekarang ini mulai digunakan dan diadaptasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *electronic government (e-government).* (Fadhli, 2010; Febriana Puryatama & Haryani, 2020)

Revolusi TIK memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berinovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE berpotensi untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. (Kemenpanrb, 2020)

Menurut Utomo & Mulyanto (2010) Pelayanan publik yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Pada *E-Government* tidak lagi menggunakan dokumen-dokumen atau hubungan personal secara langsung namun dengan melalui *E-Government* sudah dapat dilakukan secara 24 jam *non stop* dimanapun kapanpun masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah. Oleh karena itu melalui implementasi *e-Government*, banyak keuntungan yang diperoleh untuk peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik sekaligus memberikan keterpaduan antar instansi dalam pelaksanaan *e-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik.

Keinginan pemerintah untuk mewujudkan *e-government* telah dirintis pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika), di mana Inpres tersebut ditekankan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika guna mendukung *good governance*. Dalam perkembangannya, Komitmen Pemerintah dalam menggunakan *E-Government* tertuang melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Dan yang terbaru keseriusan pemerintah dalam mendukung implementasi SPBE yaitu Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE. Peraturan tersebut mengatur keterpaduan proses bisnis serta pemanfaatan teknologi canggih seperti *big data* dan artificial intelligence *(AI)* untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan pemerintah.

Fungsi *e-governmen*t semakin kuat dengan adanya keterbukaan informasi publik sebagai tujuan utama *open government* Indonesia. Sejauh ini telah terdapat beragam aplikasi ataupun web portal dan website pemerintah lainnya, tujuannya adalah untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, layanan publik yang efisien dan efektif, bahkan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan maupun pelayanan publik dalam portal satu layanan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan masukan, pengaduan melalui aplikasi ataupun web yang disediakan oleh pemerintah. (Hanafi, 2020)

Tabel 1.1 Jumlah Situs Web Pemerintah Pusat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Instansi | URL | Status |
| 1 | Pemerintah Indonesia | <https://indonesia.go.id/> | Dapat diakses |
| 2 | Mahkamah Konstitusi | <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> | Dapat diakses |
| 3 | Mahkamah Agung | <https://www.mahkamahagung.go.id/> | Dapat diakses |
| 4 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | <http://www.mpr.go.id/> | Dapat diakses |
| 5 | Dewan Perwakilan Daerah Republik | <http://www.dpd.go.id/> | Dapat diakses |
| 6 | Badan Pemeriksa Keuangan | <http://www.bpk.go.id/> | Dapat diakses |
| 7 | Dewan Perwakilan Rakyat | <http://www.dpr.go.id/> | Dapat diakses |
| 8 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | <https://www.esdm.go.id/> | Dapat diakses |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | <https://www.kemenkumham.go.id/> | Dapat diakses |
| 10 | Kementerian Perhubungan | <http://www.dephub.go.id/> | Dapat diakses |
| 11 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | <https://www.kominfo.go.id/> | Dapat diakses |
| 12 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | <https://www.kemdikbud.go.id/> | Dapat diakses |
| 13 | Kementerian Pertanian | <http://www.pertanian.go.id/> | Dapat diakses |
| 14 | Kementerian Keuangan | <https://www.kemenkeu.go.id/> | Dapat diakses |
| 15 | Kementerian Luar Negeri | <https://www.kemlu.go.id/> | Dapat diakses |
| 16 | Kementerian Pertahanan | <https://www.kemhan.go.id/> | Dapat diakses |
| 17 | Kementerian Dalam Negeri | <http://www.kemendagri.go.id/> | Dapat diakses |
| 18 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia | <https://maritim.go.id/> | Dapat diakses |
| 19 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | <https://www.kemenkopmk.go.id/> | Dapat diakses |
| 20 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | <https://kemenparekraf.go.id/> | Dapat diakses |
| 21 | Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia | <http://www.kemenpora.go.id/> | Dapat diakses |
| 22 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | <http://www.bumn.go.id/> | Dapat diakses |
| 23 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | <https://www.bappenas.go.id/id/> | Dapat diakses |
| 24 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | <https://www.menpan.go.id/> | Dapat diakses |
| 25 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <https://www.kemenpppa.go.id/> | Dapat diakses |
| 26 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | <http://www.depkop.go.id/> | Dapat diakses |
| 27 | Kementerian Sekretariat Negara | <https://www.setneg.go.id/> | Dapat diakses |
| 28 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | <https://www.atrbpn.go.id/> | Dapat diakses |
| 29 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | <http://www.kemendesa.go.id/> | Dapat diakses |
| 30 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia | <https://ristekdikti.go.id/> | Dapat diakses |
| 31 | Kementerian Kesehatan | <http://www.kemkes.go.id/> | Dapat diakses |
| 32 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <https://www.pu.go.id/> | Dapat diakses |
| 33 | Kementerian Ketenagakerjaan | <http://naker.go.id/> | Dapat diakses |
| 34 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | <http://kkp.go.id/> | Dapat diakses |
| 35 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <http://www.menlhk.go.id/> | Dapat diakses |
| 36 | Kementerian Perdagangan | <http://www.kemendag.go.id/> | Dapat diakses |
| 37 | Kementerian Perindustrian | <http://www.kemenperin.go.id/> | Dapat diakses |
| 38 | Kementerian Sosial | <https://www.kemsos.go.id/> | Dapat diakses |
| 39 | Kementerian Agama | <https://kemenag.go.id/> | Dapat diakses |
| 40 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | <https://ekon.go.id/> | Dapat diakses |
| 41 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | <https://polkam.go.id/> | Dapat diakses |
| 42 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | <https://www.perpusnas.go.id/> | Dapat diakses |
| 43 | Badan karantina Indonesia | <https://karantina.pertanian.go.id/> | Dapat diakses |
| 44 | Lembaga Ketahanan Nasional | <http://www.lemhannas.go.id/> | Dapat diakses |
| 45 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | <http://www.lkpp.go.id/v3/> | Dapat diakses |
| 46 | Lembaga Administrasi Negara | <https://lan.go.id/> | Dapat diakses |
| 47 | Badan riset dan inovasi nasional | <https://brin.go.id/> | Dapat diakses |
| 48 | Badan Standardisasi Nasional | <http://www.bsn.go.id/> | Dapat diakses |
| 49 | Badan Siber dan Sandi Negara | <http://www.BSSN.go.id> | Dapat diakses |
| 50 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | <http://basarnas.go.id/> | Dapat diakses |
| 51 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | <http://www.bappenas.go.id/> | Dapat diakses |
| 52 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | <https://www.pom.go.id/> | Dapat diakses |
| 53 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | <https://www.bapeten.go.id/> | Dapat diakses |
| 54 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | <http://www.bpkp.go.id> | Dapat diakses |
| 55 | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | <https://bp2mi.go.id/> | Dapat diakses |
| 56 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | <https://www.bnpt.go.id/> | Dapat diakses |
| 57 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | <https://www.bnpb.go.id/> | Dapat diakses |
| 58 | Badan Narkotika Nasional | <http://www.bnn.go.id> | Dapat diakses |
| 59 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | <http://www.bmkg.go.id/> | Dapat diakses |
| 60 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | <http://www.bkpm.go.id/> | Dapat diakses |
| 61 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | <https://www.bkkbn.go.id/> | Dapat diakses |
| 62 | Badan Kepegawaian Negara | <http://www.bkn.go.id/> | Dapat diakses |
| 63 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | <https://www.bakamla.go.id/> | Dapat diakses |
| 64 | Badan Informasi Geospasial | <http://www.big.go.id/> | Dapat diakses |
| 65 | Arsip Nasional Republik Indonesia | <https://www.anri.go.id/> | Dapat diakses |
| 66 | Badan Pusat Statistik | <https://www.bps.go.id/> | Dapat diakses |
| 67 | Badan Intelijen Negara | <http://www.bin.go.id/> | Dapat diakses |
| 68 | Badan pangan nasional | <https://badanpangan.go.id/> | Dapat diakses |
| 69 | Komisi pemberantasan korupsi | <https://www.kpk.go.id/> | Dapat diakses |
| 70 | Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | <https://kemenparekraf.go.id/> | Dapat diakses |
| 71 | Komisi nasional hak asasi manusia | <https://www.komnasham.go.id/> | Dapat diakses |
| 72 | Komisi penyiaran indonesia | <https://kpi.go.id/id/> | Dapat diakses |
| 73 | Komisi perlindungan anak Indonesia | <https://www.kpai.go.id/> | Dapat diakses |
| 74 | Komite olahraga nasional Indonesia | <https://koni.or.id/> | Dapat diakses |
| 75 | Lembaga perlindungan saksi dan korban | <https://lpsk.go.id/> | Dapat diakses |
| 76 | Lembaga sensor film | <https://lsf.go.id/> | Dapat diakses |

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, dan Kementrian telah menerapkan SPBE dengan memiliki 76 situs web yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari segi konten, secara umum Website Pemerintah Pusat telah memenuhi kaidah Parameter Website yang baik, dimana dalam website telah memiliki menu terkait Profil lembaga, Visi dan Misi lembaga, Tupoksi lembaga, Struktur organisasi lembaga, Informasi penjabat lembaga, Peraturan/kebijakan yang dikeluarkan, Data statistik tupoksi lembaga, Kolom berita, Kolom artikel, Link ke lembaga terkait, Link website tercantum diwebsite lain serta Jumlah *hosted*. Tentunya informasi yang ada dalam situs web tersebut bermanfaat sebagai sarana publikasi pemerintah pusat dan memberi kesempatan pada masyarakat luas untuk mengetahui dan mencari informasi yang diinginkan secara lebih terbuka dan bebas tanpa perlu melalui birokrasi.

Pemerintah daerah juga telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antar daerah. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPBE dituntut untuk berinovasi dan berpikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan produk-produk inovasi pemerintah. Inovasi dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan administrasi pemerintahan.

Gambar 1.1 Jumlah Situs Web Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

Mengenai Situs website Pemda diatas Diketahui bahwa dari 38 provinsi di Indonesia terdapat 539 situs web di tingkat pemerintahan daerah provinsi maupun kab/kota dan semuanya dapat diakses. Sebagian besar situs web pemerintah daerah telah memenuhi standar kriteria Situs Web Pemerintah Daerah yaitu memiliki konten informasi berupa pemerintahan daerah geografis, selayang pandang dan sumber daya alam atau manusia, kebijakan pemerintah daerah, serta pelayanan elektronik di setiap Website pemerintahan daerah, maka dengan begitu situs web pemerintah daerah dapat menampilkan prespektif yang baik oleh masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

Penerapan *e-government* juga dapat berupa aplikasi. DKI Jakarta sendiri, memiliki aplikasi *e-Goverment* yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Diantaranya *e-Procurement*, *e-Budgeting*, e-Musrenbang, *Qlue*, Jakarta *Smart City*, dan e-Kinerja. Aplikasi *Qlue* terhubung langsung dengan Jakarta *Smart City* (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Aplikasi *Qlue* bisa menjadi contoh bagi provinsi, kota atau bahkan kabupaten lain di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah,dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan warganya. Sebagai informasi, aplikasi lain yang diterapkan di Jakarta, yakni *e-Procurement* adalah sistem pengadaan barang atau jasa, *e-Budgeting* merupakan sistem anggaran yang juga digunakan sebagai transparansi anggaran. Kemudian, e-Musrenbang yang berperan menjadi sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Ada juga e-Kinerja, penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. (Nur Asikin, 2017)

Penerapan SPBE di berbagai instansi pemerintahan Indonesia masih ditemui beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain, yaitu (1) Terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri; (2) Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah; (3) Belum adanya pusat data *(data center)*; (4) Sistem keamanan informasi belum optimal sehingga rawan diretas; (5) Kapasitas *bandwidth* belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara instansi pemerintah; (6) Sebagian hak cipta dipegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi. (Yuhefizar et al., 2017)

Pemerintah Kota Tegal merupakan pelaksana penerapan SPBE dalam pelayanan publik. Payung hukum Pemerintah Kota Tegal dalam penerapan SPBE tertuang dalam Peraturan Walikota No 2A Tahun 2022. Pengembangan aplikasi menjadi hal penting bagi Pemerintah Kota Tegal dalam penerapan SPBE. Dalam Pasal 18 Peraturan Wali Kota Tegal menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan aplikasi dilaksanakan mengikuti siklus hidup pembangunan sistem serta Pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tegal nomor 555/001 tentang Pedoman Pengembangan Aplikasi SPBE. Berdasarkan pedoman tersebut Dinas Kominfo bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi Pranata Komputer untuk kebutuhan pengembangan aplikasi; mendampingi Pemilik Proses Bisnis dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi; melakukan uji keamanan aplikasi; menyediakan server produksi aplikasi dan memastikan aplikasi.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tegal yang menerapkan SPBE dalam pelayanan publik adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Disnakerin Kota Tegal terus berupaya mengembangkan berbagai pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi diantaranya adalah Website Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, LAPUR SIJAJA (LAyanan pariPURna untuk SIap kerJA dan menjadi seJAhtera), dan Temio (Tegal *Main Industries Outlook*).

Tabel 1.2 Daftar Aplikasi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi SPBE | Link | Status |
| Website disnakerin | <https://disnakerin.tegalkota.go.id/> | Dapat Diakses |
| Lapur sijaja | <https://lapursijaja.tegalkota.go.id/v3/> | Dapat Diakses |

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

Website Disnakerin Kota Tegal berguna untuk publikasi informasi terkait kebijakan, program, layanan, berita, dan pengumuman seputar ketenagakerjaan dan perindustrian.

Aplikasi Lapursijaja merupakan inovasi berbasis TI yang memberikan layanan dibidang ketenagakerjaan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan secara komprehensif yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari masa sebelum, pada saat dan setelah bekerja bagi para Pencari Kerja, Calon Peserta Pelatihan, Perusahaan, Pekerja/Buruh, Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Masyarakat pada umumnya. Ada tujuh fitur unggulan dalam aplikasi LAPUR SIJAJA antara lain sebagai berikut:

1. CAKAR (Cara Kartu), Fitur untuk membuat kartu AK1 secara online yang dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik dan dapat di *download* atau dicetak secara mandiri.
2. CAKER (Cari Kerja), Fitur yang memudahkan pencari kerja dalam mengiklankan diri sesuai pendidikan dan keahlian yang dimiliki pencari kerja.
3. LOKER (Lowongan Kerja), Fitur yang berisi informasi lowongan kerja terbaru baik di Kota Tegal maupun Luar Kota Tegal.
4. SILAT (Sistem Informasi Pelatihan), Fitur untuk mengakses informasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan informasi pendaftaran hingga proses seleksi pelatihan.
5. DUMAS (Pengaduan Masyarakat), Fitur untuk melayani berbagai pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
6. SIPAT (Sistem Informasi Penempatan Tenaga Kerja), Fitur yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan penempatan kerja bagi Bursa Kerja Khusus (BKK) dan perusahaan secara online.
7. SILAP (Sistem Informasi Laporan Perusahaan), Fitur untuk memudahkan perusahaan dalam menyampaikan laporan Bipartit secara online dan realtime.

Dalam implementasinya SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal masih ditemui permasalahan yaitu pertama, website disnakerin sering mengalami *server down* sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Dan Isi konten pada website Disnakerin Kota Tegal seperti berita, pengumuman, dan dokumen yang dipublikasikan tidak *up to date* terakhir di *update* pada tahun 2021-2022.

Kedua, permasalahan pada aplikasi lapursijaja yaitu proses registrasi akun yang rumit. Untuk dapat mengakses pelayanan publik melalui aplikasi lapursijaja harus registrasi akun SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu dengan mengisi sembilan formulir dan mengungunggah beberapa dokumen seperti ijazah dan *Curriculum Vitae* (CV). Setelah itu, login ke aplikasi lapursijaja via akun SIAPkerja yang sudah dibuat. Dan setelah login ke aplikasi lapursijaja juga diharuskan registrasi akun dengan mengisi formulir kemudian setelah terdaftar barulah dapat mengakses pelayanan publik yang tersedia pada aplikasi lapursijaja. Selain itu, aplikasi lapursijaja belum mendukung pada semua perangkat salah satunya yaitu perangkat iOS.

Hal ini membuktikan bahwa Implementasi SPBE di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kota Tegal belum terealisasi dengan baik. Mengingat permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM UPAYA MELAYANI MASYARAKAT DI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL”

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil suatu masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas ini maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi SPBE dalam dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

### Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
3. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
4. Manfaat Praktis
5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat.

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya melayani masyarakat Di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Tegal.

1. Bagi Lembaga Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang ketenagakerjaan seperti BKK dan Perusahaan mampu untuk memanfaatkan SPBE dalam pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama  Peneliti dan Judul Penelitian | Teori Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1. | Ragil Fitri Rahayu dan Ibrahim (2023)  “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka” | Teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers dengan indikator yaitu *knowledge* (pengetahuan), *persuasion* (kepercayaan), *decision* (keputusan), *implementation* (implementasi), *confirmation* (konfirmasi). | Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sudah bagus dalam pengembangannya. Namun, implementasi dari inovasi pelayanan yang ada belum terimplementasi dengan optimal. Inovasi pelayanannya sudah ada namun sekedar berinovasi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang inovasi pelayanan yang ada. |
| Perbedaan   * Teori Penelitian   Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers.  Teori yang digunakan dalam peneliti ini adalah Teori SPBE   * Lokasi Penelitian   Lokasi penelitian sebelumnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka  Lokasi penelitian ini di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal   * Fokus Penelitian   Fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*  Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi SPBE | | | |
| 2. | Yunita Hanysyah Musaad (2020) ”Analisis Penerapan Kebijakan *E-Government* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Merauke” | Teori elemen kesuksesan *e-government* dengan indikator *support, capacity,* dan *value* | Penerapan Kebijakan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dengan menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu; (a) *support* / dukungan : *support* pemerintah dalam pengembangan *e-government* belum sepenuhnya diberikan; (b) *capacity* yaitu Sumber Daya Manusia, ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kominfo sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan e-government di Kabupaten Merauke sampai saat ini masih terbatas; dan (c) *value* yaitu manfaat dari diterapkannya *e-government* di Kabupaten Merauke masih sebatas pada pemberian informasi seputar Kabupaten Merauke secara cepat dan mudah melalui website resmi Kabupaten Merauke. |
| Perbedaan   * Teori Penelitian   Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori elemen sukses *e-government*  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori SPBE   * Lokasi Penelitian   Lokasi penelitian sebelumnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke  Lokasi penelitian ini di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal   * Fokus Penelitian   Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu Analisis Penerapan Kebijakan *E-Government*  Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi SPBE | | | |
| 3. | Yuni Kurniasih, Tri Asih Wismaningtyas (2020)  *“Smart City* Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan *Electronic Governance”* | Teori Transformasi/ perubahan manajemen dengan indikator yaitu (1) *Reframing* (pengubahan kerangka berpikir), (2) *Retructuring* (pengubahan struktur), (3) *Revitalization* (memberdayakan kembali), (4) *Renewal* (pembaharuan) | Dalam implementasinya, telah terjadi perubahan meskipun belum menyeluruh. Contoh realisasi dari Magelang smart city antara lain memunculkan Aplikasi Magelang Cerdas, melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses pelayanan rumah sakit melalui SMS, SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu), serta DataGo (masyarakat dapat mengakses informasi atau mencari data seputar Kota Magelang). Namun dalam perkembangannya, penerapan smart city tersebut belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi yang jelas antara pihak pemerintah dengan OPD-OPD yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat dan masih kurang meleknya masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi. |
| Perbedaan   * Teori Penelitian   Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Transformasi/ perubahan manajemen  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori SPBE   * Lokasi Penelitian   Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Magelang  Lokasi penelitian ini di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal   * Fokus Penelitian   Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan *Electronic Governance*  Fokus pada penelitian ini yaitu implementasi SPBE | | | |
| 4. | Gea Tamara, Agus Widiyarta (2023) “Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Perizinan Online Melalui “Simponie” Di DPMPTSP kabupaten Serang” | Teori elemen sukses penerapan *e-government* dengan indikator yaitu *support, capacity,* dan *value* | Penerapan SIMPONIE dalam pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Serang dapat dikatakan sukses. Hal ini dilihat dari adanya *support* atau dukungan dari pemerintah berupa visi dan misi untuk mensukseskan penerapan SIMPONIE, adanya dukungan berupa peraturan yang mengatur penerapan SIMPONIE, serta adanya sosialisasi. Pada elemen *capacity* menunjukkan bahwa sumber daya finansial yang dibutuhkan dalam penerapan SIMPONIE tidak besar, selanjutnya untuk sumber daya manusia yang ada diberdayakan. Pada elemen *value* menunjukkan DPMPTSP Kabupaten Serang merasakan manfaat dari diterapkannya SIMPONIE seperti dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saat tatap muka secara langsung. Bagi masyarakat dengan adanya SIMPONIE ini memberikan kemudahan dalam permohonan perizinan. Hanya saja dalam penerapan SIMPONIE ini masih terkendala di jaringan sehingga membuat SIMPONIE terkadang tidak dapat diakses. |
| Perbedaan   * Teori Penelitian   Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori elemen sukses penerapan *e-government*  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori SPBE   * Lokasi Penelitian   Lokasi penelitian sebelumnya di DPMPTSP Kabupaten Serang  Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal   * Fokus Penelitian   Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Perizinan Online  Fokus pada penelitian ini yaitu implementasi SPBE | | | |
| 5. | Fristiza Dwi Tami dan Nora Eka Putri (2019) “Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan  Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang” | Teori Efektifitas Program dengan indikator antara lain Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu,Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata. | Kelurahan Silaing Bawah sebagai salah satu instansi pemerintah yang sudah menjalankan Program e- Kelurahan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam bidang *e-government* sudah baik namun belum efektif, ditandai dengan belum terwujudnya beberapa indikator ke efektifitasan suatu program. Program e- kelurahan sudah membantu dalam beberapa kondisi dari segi pengurusan surat oleh pihak instansi pemerintah kelurahan silaing bawah, namun belum dirasakan maksimal manfaatnya oleh masyarakat kelurahan silaing bawah sebagai masyarakat pengunna program e -kelurahan. Kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Silaing Bawah dalam menerapkan program e- kelurahan adalah kurangnya tingkat kepuasaan atas inovasi pelayanan publik dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang diberikan melalui program e- Kelurahan yang kedua adanya unsur eksternal seperti jaringan dan cuaca yang menghambat kinerja program e-Kelurahan. Sehingga menyebabkan masyarakat pengguna e- kelurahan beralih lagi ke pengurusan surat secara manual hal ini ditandai dengan turunnya angka masyarakat pengguna e kelurahan di kelurahan silaing bawah dari tahun ke tahun sejak program tersebut dikeluarkan. |
| Perbedaan   * Teori Penelitian   Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Efektifitas Program  Teori yang digunakan dalam peneliti ini yaitu Teori SPBE   * Lokasi penelitian   Lokasi penelitian sebelumnya di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang  Lokasi penelitian ini di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal   * Fokus Penelitian   Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan  Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi SPBE | | | |

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ragil Fitri Rahayu dan Ibrahim (2023) yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Fokus pada penelitian ini yaitu Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*. Hasil dari penelitian ini adalah Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sudah bagus dalam pengembangannya. Namun, implementasi dari inovasi pelayanan yang ada belum terimplementasi dengan optimal. Inovasi pelayanannya sudah ada namun sekedar berinovasi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang inovasi pelayanan yang ada.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Hanysyah Musaad (2020) yang berjudul ”Analisis Penerapan Kebijakan *E-Government* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Merauke”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen kesuksesan *e-government.* Fokus pada penelitian ini yaitu Analisis Penerapan Kebijakan *E-Government.* Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Kebijakan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kurniasih dan Tri Asih Wismaningtyas (2020) yang berjudul *“Smart City* Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan *Electronic Governance.* Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Transformasi/ perubahan manajemen. Fokus pada penelitian ini yaitu Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan *Electronic Governance.* Hasil dalam penelitian ini adalah implementasi *smart city* Kota Magelang telah terjadi perubahan meskipun belum menyeluruh. penerapan *smart city* tersebut belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi yang jelas antara pihak pemerintah dengan OPD-OPD yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat dan masih kurang meleknya masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Gea Tamara, Agus Widiyarta (2023) yang berjudul “Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Perizinan Online Melalui “Simponie” Di DPMPTSP kabupaten Serang”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen sukses penerapan *e-government*. Fokus pada penelitian ini yaitu Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Perizinan Online. Hasil dalam penelitian ini adalah Penerapan SIMPONIE dalam pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Serang dapat dikatakan sukses berdasarkan indikator support, capacity, dan value. Hanya saja dalam penerapan SIMPONIE ini masih terkendala di jaringan sehingga membuat SIMPONIE terkadang tidak dapat diakses.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fristiza Dwi Tami dan Nora Eka Putri (2019) yang berjudul “Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektifitas Program. Fokus pada penelitian ini yaitu Efektivitas Penerapan Program. Hasil dalam penelitian ini adalah Program e- Kelurahan di Kelurahan Silaing Bawah sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam bidang *e-government* sudah baik namun belum efektif, ditandai dengan belum terwujudnya beberapa indikator ke efektifitasan suatu program.

Berdasarkan posisi penelitian diatas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada teori penelitian yang digunakan yaitu teori SPBE, lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, dan fokus penelitian yaitu Implementasi SPBE.

## Kerangka Teori

### *E-Government*

**1. Pengertian *E-Government***

Istilah *e-government* berasal dari bahasa asing yang merupakan singkatan dari *electronic government* atau pemerintah elektronik. Ada beberapa definisi mengenai *e-government* antara lain sebagai berikut

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

*E-government* melibatkan penggunaan program teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah (Fraga, 2002).

*E-government* bisa didefinisikan sebagai cara bagi pemerintah untuk menggunakan informasi dan komunikasi paling inovatif dengan menggunakan teknologi, khususnya aplikasi Internet berbasis web, untuk menyediakan akses bagi warga dan bisnis yang lebih mudah ke informasi dan layanan pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lembaga proses demokratis (Fang, 2002: 4).

Dawes, (2008: 86) mendefinisikan *E-government* sebagai “Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung layanan publik, pemerintah administrasi, proses demokratis, dan hubungan diantara warga negara, masyarakat sipil, swasta sektor, dan negara ”.

*Electronic Government* atau *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, lembaga-lembaga lainnya secara online. (Yusuf et al., 2023)

The World Bank (2015) mendefinisikan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan badan pemerintah, seperti: *Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing* yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainnya. *E-government* adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014).

**2. Tujuan dan Manfaat *E-Government***

*E-government* yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif.
3. Melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional.

Indrajit (2002) dikutip pada (Khairudin et al., 2021) menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan *e-government* didalam sebuah tata pemerintahannya atau di dalam prosesnya melayani masyarakat yang diantaranya:

1. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance.*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

**3. Relasi *E-government***

Menurut Indrajid (2002) ada empat model relasi penyampaian *e-government* kepada publik yang berkembang yaitu:

1. *Government to Citizen* (G2C)

*Government to Citizen* (G2C) merupakan sebuah teknologi informasi yang bertujuan dalam meningkatkan interaksi pemerintah-masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk menemukan berbagai informasi tentang pemerintah. Misalnya, informasi seperti membayar pajak online, mencari lowongan, layanan jaminan sosial.

1. *Government to Government* (G2G)

*Government to Government* (G2G) merupakan suatu teknologi dalam bidang pemerintahan yang telah dirancang untuk memenuhi berbagai jenis informasi yang dibutuhkan antara satu pemerintah dengan yang lain untuk memfasilitasi dan memperlancar dalam kerja sama antara pemerintah yang telah bersangkutan, semisal layanan komunitas terpadu, konsultasi online dan sistem pendidikan online.

1. *Government to Bussines* (G2B)

*Government to Business* (G2B) merupakan suatu teknologi dalam bidang pemerintahan yang telah dirancang untuk memenuhi berbagai jenis informasi yang dibutuhkan dalam hubungan antara pemerintah dan dunia bisnis. Misalnya, dalam sebuah informasi tentang pajak perusahaan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, dan lain sebagainya.

1. *Government to Employees* (G2E)

*Government to Employee* (G2E) merupakan suatu teknologi dalam bidang pemerintahan yang telah dirancang untuk memenuhi berbagai jenis informasi yang ditujukan pada pejabat atau pegawai pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan untuk memastikan kesejahteraan pegawai pemerintah. Contoh aplikasi G2E yaitu Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah sehingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga sistem tersebut dibutuhkan juga sebagai penunjang proses rotasi, mutasi, demosi dan promosi seluruh pegawai pemerintahan.

**4. Elemen Sukses Pengembangan *E-government***

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government*, untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan (Indrajit, 2006 : 15). Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support*

Elemen *support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government.* Adanya dukungan atau *political will* dari kalangan pejabat publik agar konsep *e-government* dapat diterapkan*.* Dukungan yang dimaksudkan disini dapat berupa :

1. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung pencipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya regulasi yang jelas).
4. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
5. *Capacity*

Elemen *capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait dengan menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni:

1. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government.*
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
4. *Value*

Elemen *value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga mas yarakat sebagai penerima pelayanan *e-government.* Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

### Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

1. **Pengertian SPBE**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE**

a. Visi SPBE

Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

b. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang ko mpeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

d. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE

**3. Prinsip SPBE**

Prinsip SPBE adalah seperangkat pedoman atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Prinsip SPBE antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektifitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Efektivitas pada dasarnya memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, dalam mencapai tingkatan pelayanan yang efektif, tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya akan digunakan untuk pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawab pegawai sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat selaku penerima layanan dapat terpenuhi dengan baik.

1. Keterpaduan

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Penerapan SPBE yang terpadu akan mentransformasi sistem pemerintahan, baik dari segi tata kelola pemerintahan, tata kelola aplikasi, dan infrastruktur, serta manajemen pelaksana. Hal tersebut yang mengedepankan prinsip berbagi sumber daya, kolaborasi, dan integrasi antar instansi pemerintah. Untuk percepatan implementasi SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, dilakukan pembangunan/pengembangan aplikasi umum berbagi pakai untuk bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.

1. Kesinambungan

Kesinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Dengan penyusunan program yang baik maka dapat membantu pegawai dalam bekerja secara sistematis dan terstruktur sehingga kinerja organisasi dapat meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan strategis merupakan kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa pegawai dan pimpinan bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan.

Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya.

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal cepat dan tepat serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya dapat dihitung penggunaanya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. Akuntabilitas memiliki dasar pelaporan yang jelas, sigap, akurat, dan tidak (minim) menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, dengan SPBE pelaporan evaluasi dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, terukur, dan dapat diamati publik (transparan).

Laporan pertanggungjawaban bertujuan menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari sebelum digelar, saat berlangsung, dan setelah kegiatan selesai. Laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh penyelenggara SPBE dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan pertanggungjawaban juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat serta pada penyelenggaraan SPBE tersebut.

1. Interoperabilitas

Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Interoperabilitas merupakan kapabilitas dari suatu produk atau sistem (yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya) untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Interoperabilitas pada dasarnya akan menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

Fokus interoperabilitas adalah kapabilitas sebuah sistem TIK untuk dapat berinteraksi dengan sistem lainnya. Adanya konsep interoperabilitas akan memungkinkan sistem yang sedang dikembangkan untuk menggunakan data yang dimiliki oleh sistem yang sudah ada, baik data dari sistem yang dimiliki oleh instansi yang sama, maupun instansi yang berbeda.

1. Keamanan

Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan keabsahan sumber daya yang mendukung SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

Untuk penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Sedangkan untuk penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

**4. Tata Kelola SPBE**

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Unsur-unsur SPBE meliputi:

**a. Rencana Induk SPBE Nasional**

Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.

Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:

1. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. arah kebijakan SPBE;
3. strategi SPBE; dan
4. peta rencana strategis SPBE.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

1. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
2. Perubahan kebijakan strategis nasional. Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

**b. Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh:

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
4. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.

Pasal 9 ayat (5) Perpres SPBE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Namun sampai dengan tulisan hukum ini disusun, Peraturan Menteri tersebut belum ditetapkan.

Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
3. Perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat (rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan/atau layanan SPBE); atau
4. Perubahan rencana strategis Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah tersebut dilakukan berdasarkan:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan/atau layanan SPBE); atau
4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**c. Peta Rencana SPBE**

Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Nasional memuat:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**d. Rencana dan anggaran SPBE**

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing. Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**e. Proses Bisnis**

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam penyusunan Proses Bisnis, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Sedangkan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**f. Data dan informasi**

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi tersebut dalam SPBE. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Standar interoperabilitas data dan informasi tersebut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Instansi Pusat menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

**g. Infrastruktur SPBE**

Infrastruktur SPBE terdiri atas:

1. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
2. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:

1. Pusat Data nasional;
2. Jaringan Intra pemerintah; dan
3. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Pusat Data nasional tersebut terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

**h. Aplikasi SPBE**

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Aplikasi Umum; dan
2. Aplikasi Khusus.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Dalam menggunakan aplikasi sejenis, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:

1. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
2. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
3. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
4. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE. Repositori Aplikasi SPBE dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Sementara terkait Aplikasi Khusus, Perpres SPBE belum mewajibkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Pasal 39 Perpres SPBE hanya menjelaskan bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

**i. Keamanan SPBE**

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Untuk penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Sedangkan untuk penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

**j. Layanan SPBE**

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik layanan publik berbasis elektronik. Layanan SPBE yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Sedangkan Layanan SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

1. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Selanjutnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

1. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

## Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi *e-government* adalah Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lain.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada pelayanan publik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

## Pokok-Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian ini mengikuti Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan aspek sebagai berikut:

1. Efektivitas, dengan ruang lingkup Anggaran, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur TIK, Kemudahan akses pada aplikasi
2. Keterpaduan, dengan ruang lingkup Integrasi data, proses integrasi data, dan Aplikasi umum
3. Kesinambungan, dengan ruang lingkup Pembaharuan kebijakan, Pengembangan teknologi terbaru, Pemeliharaan dan pembaharuan sistem, Pengembangan kapasitas SDM
4. Efisiensi, dengan ruang lingkup Anggaran, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur TIK, Waktu penyelesaian
5. Akuntabilitas, dengan ruang lingkup Pertanggungjawaban dan transparansi
6. Interoperabilitas, dengan ruang lingkup Kolaborasi antar sektor, Persyaratan penyelenggaraan layanan interoperabilitas data, dan

Standar interoperabilitas data

1. Keamanan, dengan ruang lingkup Kolaborasi antar sektor, Standar keamanan, Keamanan data dan informasi, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi

## Alur Pikir

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan melalui bagan di bawah ini

Prinsip-prinsip SPBE Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018

1. Efektivitas
2. Keterpaduan
3. Kesinambungan
4. Efisiensi
5. Akuntabilitas
6. Interoperabilitas
7. Keamanan

Pelaksanaan tata kelola SPBE

Permasalahan SPBE di Disnakerin Kota Tegal

1. Website disnakerin sering mengalami *server down* sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Dan Isi konten pada website Disnakerin Kota Tegal seperti berita, pengumuman, dan dokumen yang dipublikasikan tidak *up to date* terakhir di *update* pada tahun 2021-2022.
2. Aplikasi lapursijaja, dimana proses registrasi akun yang rumit. Untuk dapat mengakses pelayanan publik melalui aplikasi lapursijaja harus registrasi akun SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Selain itu, aplikasi lapursijaja belum mendukung pada semua perangkat salah satunya yaitu perangkat iOS.

SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal untuk pelayanan publik

1. Website Disnakerin Kota Tegal
2. Lapursijaja (Layanan Paripurna untuk siap kerja dan menjadi sejahtera)

Implementasi SPBE Pemerintah Kota Tegal berdasarkan Peraturan Walikota No 2A Tahun 2022

# METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian

**1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan. tulisan dan atau perilaku yang sedang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau sebuah organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehersif.

**2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan. Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2011:69).

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Alasan memilih lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal Karena OPD tersebut telah melaksanakan SPBE dalam pelayanan publik.

## Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, survei, wawancara, atau observasi. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

Tabel 3.1 Data Set

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No . | Aspek | Ruang  Lingkup | Bentuk  Data | Sumber  Data |
| 1. | Efektivitas | * Anggaran * Sumber Daya Manusia * Infrastruktur TIK * Kemudahan akses pada aplikasi | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana program SPBE, Masyarakat pengguna aplikasi, dan Operator aplikasi SPBE |
| 2. | Keterpaduan | * Integrasi Data * Prosedur Integrasi data * Aplikasi umum | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana Program SPBE, Operator aplikasi SPBE |
| 3. | Kesinambungan | * Pembaruan kebijakan * Pengembangan Teknologi terbaru * Pemeliharaan dan pembaharuan sistem * Pengembangan kapasitas SDM | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana program SPBE, operator aplikasi SPBE |
| 4. | Efisiensi | * Anggaran * Sumber Daya Manusia * Infrastruktur TIK * Waktu penyelesaian layanan | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana program SPBE, Masyarakat pengguna aplikasi, dan operator aplikasi |
| 5. | Akuntabilitas | * Pertanggungjawaban * Transparansi | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana program SPBE, Operator Aplikasi SPBE |
| 6. | Interoperabilitas | * Kolaborasi antar sektor * Persyaratan penyelenggaraan layanan interoperabilitas data * Standar interoperabilitas data | Hasil wawancara | Perencana program dan Pelaksana Program SPBE, Operator Aplikasi SPBE |
| 7. | Keamanan | * Kolaborasi antar sektor * Keamanan data dan informasi * Keamanan Jaringan * Keamanan Aplikasi | Hasil wawancara | Perencana program dan pelaksana Program SPBE, Operator Aplikasi SPBE |

*Sumber: Diolah oleh peneliti*

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung analisis dalam penelitian yang bertujuan menguatkan hasil-hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan atau dokumentasi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal melalui Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berhubungan dan dapat menunjang Penelitian ini.

Tabel 3.2 Data Set

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Aspek | Ruang lingkup | Bentuk data |
| 1. | Efektifitas | Anggaran dan Infarstruktur TIK | Dokumen |
| 2. | Keterpaduan | Prosedur Integrasi Data dan Aplikasi umum | Dokumen dan Situs web |
| 3. | Kesinambungan | Kebijakan | Dokumen dan Situs web |
| 4. | Efisiensi | Anggaran dan infrastruktur TIK | Dokumen |
| 5. | Akuntabilitas | Laporan kinerja | Dokumen |
| 6. | Interoperabilitas | Standar data interoperabilitas, Persyaratan penyelenggaraan layanan interoperabilitas data | Dokumen dan Situs web |
| 7. | Keamanan | Keamanan data dan informasi, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi | Dokumen dan Situs web |

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

## Informan Penelitian

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive* sampling, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun unsur dari informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah

1. Perencana Program SPBE dan Pelaksana Program SPBE yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Operator SPBE yaitu Pranata Komputer
3. Masyarakat pengguna aplikasi SPBE sebanyak 25 orang

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui Implementasi SPBE dalam pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

1. Wawancara

Pertemuan langsung dengan responden dengan melakukan tanya jawab guna menggali informasi terkait Implementasi SPBE dalam pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari informasi dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dari foto atau bukti tertulis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *tools* Nvivo 12 *Plus*. NVivo 12 *Plus* digunakan dalam pembuatan koding *(coding)* dari data hasil wawancara terhadap narasumber terpilih. Tujuan utama melakukan koding adalah untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan peneliti. NVivo 12 *Plus* dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian.Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan memvisualisasikan hasil pengolahan data dengan software NVivo ini kedalam bentuk model-model visualisasi, grafik-grafik atau diagram-diagram NVivo.

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Nvivo 12 *Plus*

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

## Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

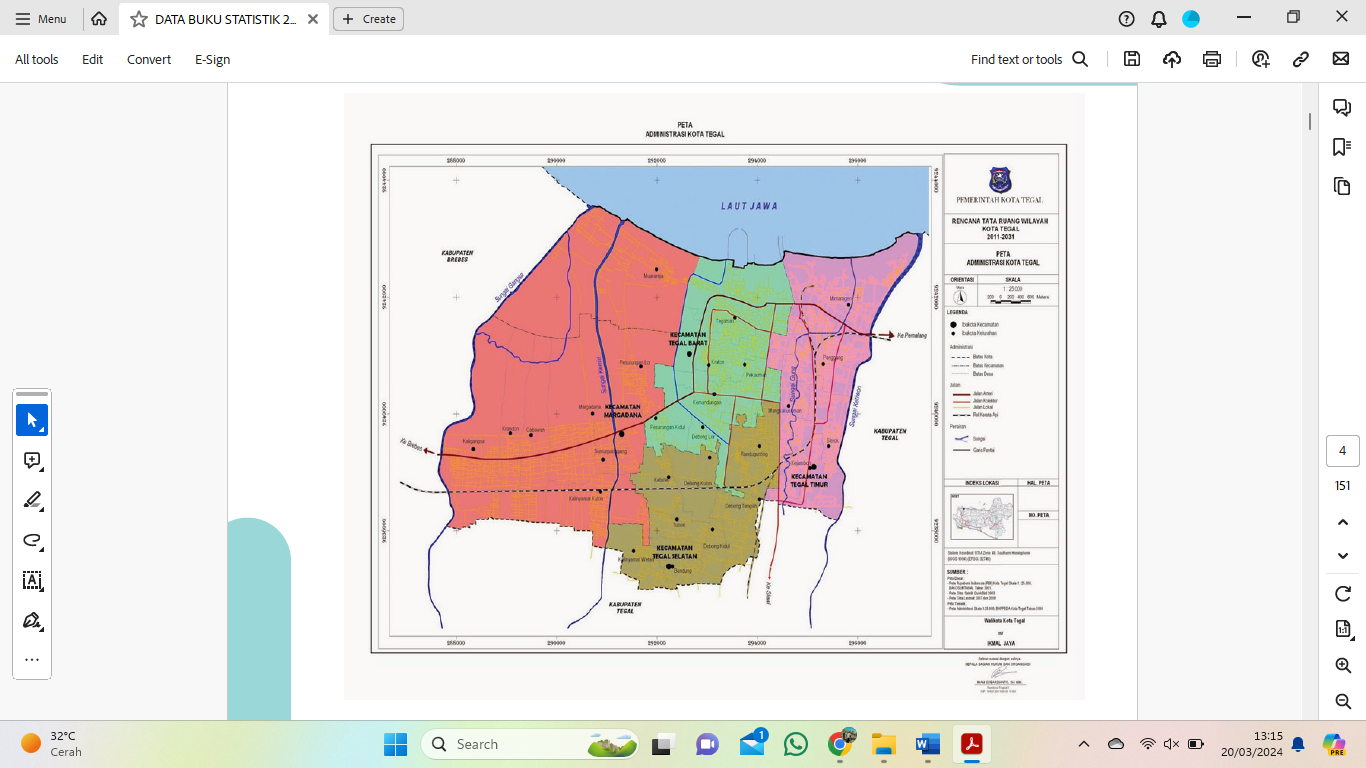
1. BAB I Pendahuluan, berisi tentang (a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; dan (d) Manfaat Penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, berisi (a) Penelitian Terdahulu; (b) Kerangka Teori; (c) Definisi Konseptual; (d) Pokok-Pokok Penelitian; (e) dan Alur Pikir.
3. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini penelitian menyampaikan metode penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini meliputi (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian; (b) Jenis dan Sumber Data; (c) Informasi Peneliti; (d) Teknik Pengumpulan Data; (e) Teknik Analisis Data; dan (f) Sistematika Penulisan.
4. BAB VI Deskripsi Wilayah Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang gambaran secara umum terkait wilayah yang menjadi sebagai lokasi penelitian.
5. BAB V Hasil dan Pembahasan, berisi tentang hasil-hasil yang diperoleh pada saat melakukan dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh tentang Implementasi SPBE dalam upaya melayani masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.
6. BAB VI Penutup, berisikan kesimpulan yang akan menjadi pokok permasalahan yang ada, serta saran yang berisi tentang pembahasan dalam penelitian yang perlu dilakukan. Kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan hasil Peneliti

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## Gambaran Umum

### Keadaan Geografis

Gambar 4.1 Peta Kota Tegal



*Sumber : Kota Tegal Dalam Angka 2022\_2023*

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada diujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 109004’28” sampai 109009’41” garis Bujur Timur dan 06050’21” sampai 06054’00” garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan dua kabupaten: sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Adapun di sebelah Utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditambah lagi dengan wilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Selanjutnya luas wilayah Kota Tegal pada tahun 2020 mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Luas wilayah Kota Tegal tahun 2023 adalah 39,14 km2, atau sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Margadana yaitu sebesar 13,28 km2 atau sekitar 33,93 persen dari luas wilayah Kota Tegal.

Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat sungai yang melewati 15 kelurahan (55,56 persen). Empat sungai tersebut adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung, dan Kemiri. Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan.

## Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. yaitu:

a. Tegal Selatan. Terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan. Bandung. Debong Kidul. Tunon. Keturen. Debong Kulon. Debong Tengah. dan Randugunting.

b. Tegal Timur. Terdiri dari lima kelurahan yaitu Kejambon. Slerok. Panggung. Mangkukusuman dan Mintaragen.

c. Tegal Barat. Terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Pesurungan Kidul. Debong Lor. Kemandungan. Pekauman. Kraton. Tegalsari dan Muarareja.

d. Margadana. Terbagi menjadi tujuh kelurahan yaitu Kaligangsa. Krandon. Cabawan. Margadana. Kalinyamat Kulon. Sumurpanggang. dan Pesurungan Lor.

Pada tahun 2023,untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat. wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi ke dalam 166 Rukun Warga (RW) dan 1.125 Rukun Tetangga (RT).

## Kondisi Pemerintahan

Dalam pemerintahan eksekutif. pada tahun 2023 Kota Tegal memiliki 3.094 PNS di lingkungan dinas/instansi pemerintah. Jika dilihat komposisi seluruh PNS menurut jenis kelamin. banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan hampir berimbang yaitu 1.454 pegawai laki-laki dan 1.640 pegawai perempuan. Dari segi pendidikan. komposisi PNS di lingkungan pemerintahan Kota Tegal didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir sarjana ke atas. yaitu sebanyak 1.716 pegawai. Menurut kepangkatan. pegawai dengan golongan III ke atas dengan rincian pegawai golongan III sebanyak 1.970 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 623 pegawai.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan PNS di Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tingkat**  **Pendidikan** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah total** |
| SD | 30 | - | 30 |
| SMP | 45 | 3 | 48 |
| SMA | 249 | 130 | 424 |
| Diploma I | - | - | - |
| Diploma II | 13 | 8 | 21 |
| Diploma III | 162 | 336 | 498 |
| Diploma IV | 33 | 33 | 66 |
| S1/Sarjana | 687 | 1.029 | 1.716 |
| S2/Pasca Sarjana | 188 | 100 | 288 |
| S3/Doktor/Ph.D | 2 | 1 | 3 |
| KOTA TEGAL | 1.454 | 1.640 | 3.094 |

*Sumber : Kota Tegal Dalam angka 2022­\_2023*

## Visi dan Misi Kota Tegal

1. Visi Kota Tegal Tahun 2019-2024

“Terwujudnya Pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Displin dan Inovatif”

1. Misi Kota Tegal 2019-2024
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif berbasis teknologi informasi ;
3. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender;
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu;
5. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energy terbarukan;
6. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
7. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

## Kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pada tahun 2023. Anggota DPRD di Kota Tegal diduduki oleh 30 orang anggota yang berasal dari 7 partai politik. Dengan rincian anggota terdiri dari 26 orang anggota laki-laki dan 4 orang anggota perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi S1. yaitu sebanyak 11 orang (10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Adapun jika dilihat menurut kelompok umur. jumlah anggota DPRD terbanyak pada kelompok umur 36-50 tahun dan 51-60 tahun yang masing-masing sejumlah 12 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Anggota DPR Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelompok umur | Jenis kelamin/Gender | | |
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah total |
| < = 35 | 2 | - | 2 |
| 36-50 | 10 | 2 | 12 |
| 51-60 | 10 | 2 | 12 |
| > = 61 | 4 | - | 4 |
| Kota tegal | 26 | 4 | 30 |

*Sumber : Kota Tegal Dalam angka 2022\_2023*

## Kondisi Kependudukan

Penduduk Kota Tegal tahun 2023 semester II berdasarkan data administrasi Dinas Penduduk dan Catatan Sipil sebanyak 282.781 jiwa yang terdiri atas 142.593 jiwa penduduk laki-laki dan 140.188 jiwa penduduk perempuan.

Dari perbandingan ini diperoleh rasio jenis kelamin 101,71. Artinya pada setiap sekitar 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2024, persentase jumlah penduduk tersebesar menurut kecamatan di Kota Tegal terdapat pada Kecamatan Tegal Timur sebesar 28.87%. Persentase ini berbanding lurus dengan kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2023 di kecamatan ini. Kepadatan Kecamatan Tegal Timur mencapai 11.384 jiwa/km2. Artinya setiap 1 km2 di Kecamatan Tegal Timur terdapat sekitar 11.384 jiwa. Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pendidikan di Kota Tegal.

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk Kota Tegal pada kelompok usia lanjut mengerucut dan jumlah penduduk paling banyak pada usia muda.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelompok**  **Umur** | **Jenis kelamin** | | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah Total** |
| 0-4 | 11.638 | 11.180 | 22.818 |
| 5-9 | 10.886 | 10.214 | 21.100 |
| 10-14 | 10.842 | 10.267 | 21.109 |
| 15-19 | 11.232 | 10.656 | 21.888 |
| 20-24 | 11.282 | 10.581 | 21.863 |
| 25-29 | 11.315 | 10.640 | 21.955 |
| 30-34 | 11.314 | 10.547 | 21.861 |
| 35-39 | 11.378 | 10.657 | 22.035 |
| 40-44 | 11.896 | 11.295 | 23.191 |
| 45-49 | 11.126 | 10.657 | 21.783 |
| 50-54 | 8.874 | 8.743 | 17.617 |
| 55-59 | 6.771 | 7.291 | 14.062 |
| 60-64 | 5.341 | 6.187 | 11.528 |
| 65-69 | 4.311 | 5.058 | 9.369 |
| 70-74 | 2.686 | 3.433 | 6.119 |
| 75+ | 1.701 | 2.782 | 4.483 |
| **Kota Tegal** | 142.593 | 140.188 | 282.781 |

*Sumber :* *Kota Tegal Dalam angka 2022­\_2023*

## Profil Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang ada di Kota Tegal. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terletak di Jl. Hang Tuah No.25, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah.

## Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

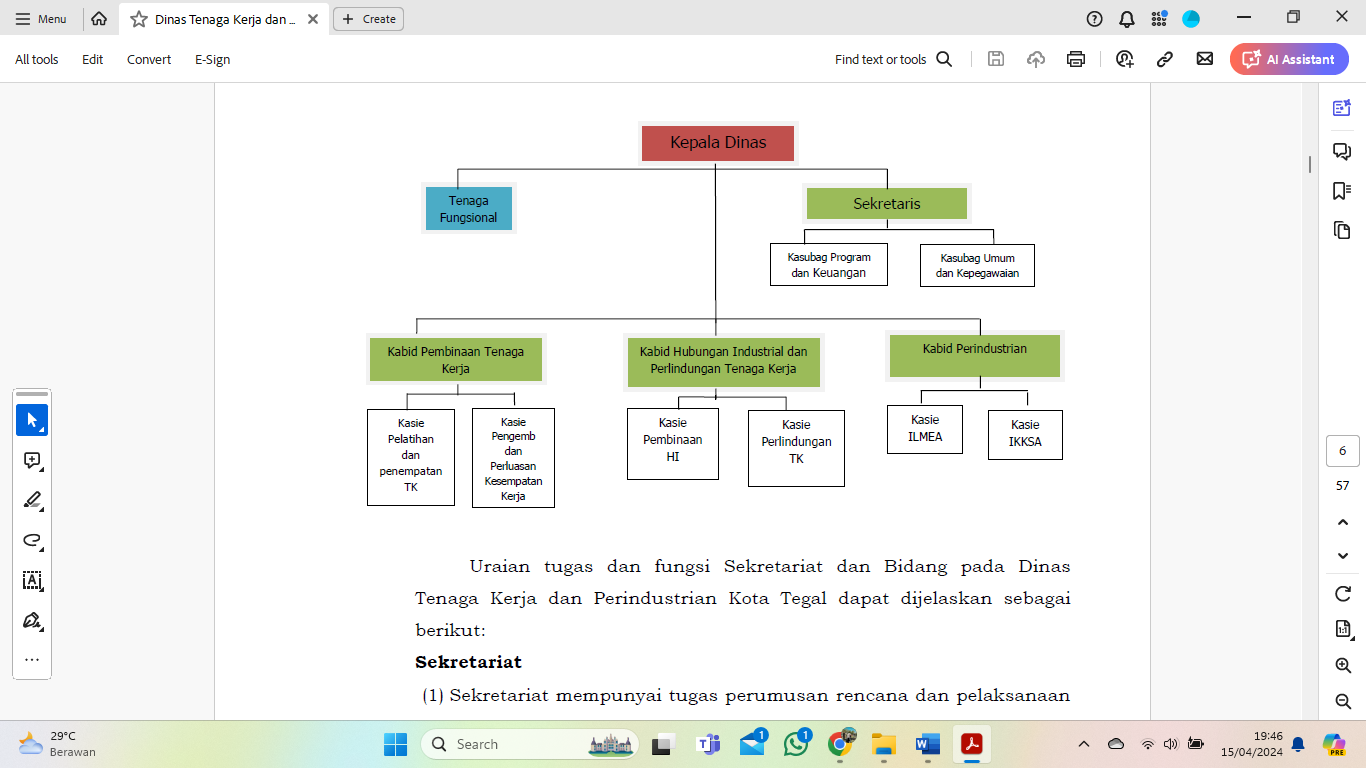
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

Adapun Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal



*Sumber : Rancangan Akhir RENSTRA DISNAKERIN 2019 - 2024*

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal terdiri dari:

1. Kepala dinas
2. Sekertariat, terdiri dari
3. Subbagian Program dan Keuangan
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian
5. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, terdiri dari :
6. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
7. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
9. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial
10. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
11. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
12. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Agro dan Kimia
13. Industri Kreatif, Kerajinan, Sandang dan Aneka
14. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
15. Mediator
16. Pranata Komputer
17. Arsiparis
18. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
19. Statistisi

## Kondisi SPBE di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SPBE dalam pelayanan publik. Ada beberapa aplikasi SPBE yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal antara lain sebagai berikut

Tabel 4.4 Aplikasi SPBE di Disnakerin Kota Tegal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi SPBE | Link | Status |
| Website disnakerin | <https://disnakerin.tegalkota.go.id/> | Dapat Diakses |
| Lapursijaja | <https://lapursijaja.tegalkota.go.id/v3/> | Dapat Diakses |

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

1. **Website Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal**

Website Disnakerin Kota Tegal berguna untuk publikasi informasi terkait kebijakan, program, layanan, berita, dan pengumuman seputar ketenagakerjaan dan perindustrian.

Gambar 4.3 Laman Situs Web Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal



*Sumber : disnakerin.tegalkota.go.id*

1. **Aplikasi Lapursijaja (Layanan Paripurna Untuk Siap Kerja Dan Menjadi Sejahtera)**

Gambar 4.4 Laman Situs Web Lapursijaja



*Sumber : lapursijaja.tegalkota.go.id*

Aplikasi Lapursijaja merupakan inovasi berbasis TI yang memberikan layanan dibidang ketenagakerjaan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan secara komprehensif yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari masa sebelum, pada saat dan setelah bekerja bagi para Pencari Kerja, Calon Peserta Pelatihan, Perusahaan, Pekerja/Buruh, Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Masyarakat pada umumnya. Ada tujuh fitur unggulan dalam aplikasi LAPUR SIJAJA antara lain

1. CAKAR (Cara Kartu), Fitur untuk membuat kartu AK1 secara online yang dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik dan dapat di *download* atau dicetak secara mandiri.
2. CAKER (Cari Kerja), Fitur yang memudahkan pencari kerja dalam mengiklankan diri sesuai pendidikan dan keahlian yang dimiliki pencari kerja.
3. LOKER (Lowongan Kerja), Fitur yang berisi informasi lowongan kerja terbaru baik di Kota Tegal maupun Luar Kota Tegal.
4. SILAT (Sistem Informasi Pelatihan), Fitur untuk mengakses informasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan informasi pendaftaran hingga proses seleksi pelatihan.
5. DUMAS (Pengaduan Masyarakat), Fitur untuk melayani berbagai pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
6. SIPAT (Sistem Informasi Penempatan Tenaga Kerja), Fitur yang digunakan untuk pengelolaan data dan pelaporan penempatan kerja bagi Bursa Kerja Khusus (BKK) dan perusahaan secara online.
7. SILAP (Sistem Informasi Laporan Perusahaan), Fitur untuk memudahkan perusahaan dalam menyampaikan laporan Bipartip secara online dan *realtime.*